



RENCANA KERJA TAHUN 2022

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 24 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Tahun 2022 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tata Cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 314);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2000-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng

- Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

1. RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2022.
2. RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu pelaksanaan Tahun 2022.
3. RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
4. Kepala BAPPELITBANGDA menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Tahun 2022.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

1. Penjabaran RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
 - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
 - BAB VII : PENUTUP.
2. Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 4

1. Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2022 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA-PD Tahun 2022 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

1. Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kerja masing-masing program, kegiatan dan subkegiatan.
2. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

1. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
2. Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Juni 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



H. DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG,**



SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 24**

KATA PENGANTAR

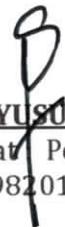
Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Isi dari rencana kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 - 2023.

Dalam penyusunannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Demikian Renja Tahun 2022 ini disusun dengan harapan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 berlangsung dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Pangkajene, Oktober 2021

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG


MUH. YUSUF, SH., M.Kn
Pangkat Pembina
Nip. 19820101 201101 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	3
I.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
II.2 Analisis Kinerja pelayanan	16
II.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD	18
II.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	27
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
III.2 Tujuan Renja Bapenda	27
III.3 Sasaran Renja Bapenda	27
III.4 Program dan Kegiatan	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
BAB V PENUTUP	40

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Suatu Kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan Hukum agar supaya kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan, pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 , Nomor 26)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Negara Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

I.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah :

1. Pelaksanaan pelayanan perangkat daerah
2. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan
3. Penyusunan rencana anggaran perangkat daerah

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu an perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian ini dijelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran perangkat daerah, program dan kegiatan perangkat daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini memuat seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Evaluasi Renja SKPD) Tahun 2020 merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input dan output sebagaimana telah tertuang pada dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD secara umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2020.

Adapun keberhasilan suatu proses perencanaan akan dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak pada capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, bahan evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra 2018-2023 dapat dilihat pada tabel T.C 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2021
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 -2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2021) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023		
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	12
4.	Urusan Penunjang										
4.02	Urusan Penunjang Keuangan										
4.02.02	Badan Pendapatan Daerah										
4.02.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
4.02.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	Imbr 2299		600 Imbr	600 Imbr	100				
4.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan 48		12 bln	12 bln	100				
4.02.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan 48		12 bln	12 bln	100				
4.02.02.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	unit 1		3 unit	3 unit	100				

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 -2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2021) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023		Capaian
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4)	12
4.02.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda empat dan dua yang terbayarkan	76 unit		24 unit	8 unit	33				
4.02.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	48 Bulan		12 bln	12 bln	100				
4.02.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	48 Bulan		12 bln	12 bln	100				
4.02.02.01.11	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	48 Item		40 Item	40 Item	100				
4.02.02.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku bacaan & peraturan perundang-undangan	879 Exmp		200 eks	200 eks	100				
4.02.02.01.17	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah konsultasi ke dalam daerah	100 %		100 %	100 %	100				
4.02.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah	100 %		100 %	100 %	100				
4.02.02.01.20	Pelayanan administrasi perkantoran	Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia	48 Bulan		12 bln	12 bln	100				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 -2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2021) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023		
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	12
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	0								
4.02.02.02	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan kantor yang diadakan	unit	2	1 unit	1 unit	100				
4.02.02.02.03	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	unit	1							
4.02.02.02.05	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	unit	24	3 unit	3 unit	100				
4.02.02.02.07	Pengadaan peralatan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	unit	268	61 unit	61 unit	100				
4.02.02.02.09	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	4	1 unit	1 unit	100				
4.02.02.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara jabatan rutin/berkala	unit	76	24 unit	24 unit	100				
4.02.02.02.24	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN APAIAN KINERJA & KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
4.02.02.06	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	Laporan	24	6 lap	6 lap	100				
4.02.02.06.01	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Laporan	8	2 lap	2 lap	100				
4.02.02.06.02	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	Laporan	4	1 lap	1 lap	100				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 -2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2021) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023		Capaian
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 = (5+7+9)	11=10/4	12
4.02.02.06.03	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Laporan		1 lap	1 lap	100				
4.02.02.06.04	PROGRAM PERENCANAAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	Persentase tercapainya PAD I & PAD II									
	Penyenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase terselenggaranya sistem informasi pajak dan retribusi daerah	%		100 %	100 %	100				
4.02.02.19	Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase penyusunan SOP Pajak & Retribusi Daerah	%		100 %	100 %	100				
4.02.02.19.01	Pemeliharaan & pemutakhiran basis data dan pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase terpeliharanya dan pemutakhiran basis data pajak dan retribusi daerah	%		100 %	100 %	100				
4.02.02.19.02	Pemeriksaan pajak daerah	Persentase meningkatnya Penerimaan PAD	%		100 %	100 %	100				
4.02.02.19.03	Monitoring & evaluasi pemungutan pajak daerah & retribusi daerah	Persentase meningkatnya pengawasan PAD	%		100 %	100 %	100				
..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	%		-	-		100 %	100 %	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 -2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2021) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %					100 persen	100 persen	100
..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA, DPPA)	Dok	6				2 Dok	2 Dok	33
..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja)	Lap.	6				2 Lap.	2 Lap.	33
..01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan money)	Lap	12				4 Lap	4 Lap	33
..01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100 persen					100 persen	100 persen	100
..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	36				12 Bulan	12 Bulan	33
..01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu pelaksanaan administrasi tugas ASN	Bulan	36				12 Bulan	12 Bulan	33
..01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	3				1 Lap	1 Lap	33
..01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Lap	6				2 Lap	2 Lap	33

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 -2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2021) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023		Capaian
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1			4	5	6	7	8=7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4)	12
..01.2.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Lap 3					1 Lap	1 Lap	33	
..01.2.04	Administrasi Pendapatuan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi penerimaan retribusi pasar	persen 92					90 %	90 %	98	
..01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah Yang Terdata dan Terdaftar	Objek Retribusi 11820					Objek Retribusi 3750	Objek Retribusi 3750	32	
..01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	Bulan 36					12 Bulan	12 Bulan	33	
..01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah SKRD Yang Dicitak	Lembar 11820					3750 Lembar	3750 Lembar	32	
..01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Retribusi Daerah	Laporan 6					2 Laporan	2 Laporan	33	
..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	% 100					100 %	100 %	100	
..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	Buah 900					300 Buah	300 Buah	33	
..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	Buah 1110					360 Buah	360 Buah	32	
..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	Blok 39391					13000 Blok	13000 Blok	33	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 -2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023		
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2021) (Target APBD)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6)	9	10=(5+7+9) (11=10/4)	12
..01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Tersedia	Eksemplar 144					48 Eksemplar	48 Eksemplar	33
..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali 300					100 Kali	100 Kali	33
..01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	% 100					100 %	100 %	100
..01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	Unit 95					35 Unit	35 Unit	37
..01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit 3					1 Unit	1 Unit	33
..01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit 57					19 Unit	19 Unit	33
..01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen 100					100 persen	100 persen	100
..01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	Lembar 1200					400 Lembar	400 Lembar	33
..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan 36					12 Bulan	12 Bulan	33

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 -2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2021) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1										
..01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan	36	6	7	8=7/6)	12 Bulan	12 Bulan	33
..01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam baik	%	100				100 %	100 %	100
..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan STNK Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	78				26 Unit	26 Unit	33
..01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	6				2 Unit	2 Unit	33
..01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	150				50 Unit	50 Unit	33
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola Bapenda	persen	100				92 %	92 %	92
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	persen	100				93 %	93 %	93

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 -2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2021) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023		
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah objek pajak baru yang terdata	Objek pajak baru	600	Objek pajak baru	200	Objek pajak baru	200	Objek pajak baru	33	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah perda / perbub yang tersusun	Dok	15	Dok	5		5	5 Dok	33	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah petugas & wajib pajak yang mendapat penyuluhan	Orang	300	Orang	100		100	100 Orang	33	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang tersedia	Aplikasi	4	Aplikasi	2		2	2 Aplikasi	50	
5.02.04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak daerah yang terdata dan terdaftar	Objek pajak	22587	Objek pajak	7529		7529	7529 Objek pajak	33	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi basis data pajak daerah yang dipelihara	Aplikasi	6	Aplikasi	3		3	3 Aplikasi	50	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak PBB dan BPHTB yang termutakhirkan datanya	Objek pajak	102000	Objek pajak	34000		34000	34000 Objek pajak	33	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	Wajib pajak	782124	Wajib pajak	260708		260708	260708 Wajib pajak	33	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Waktu penyediaan layanan dan konsultasi pajak	Bulan	36	Bulan	12		12	12 Bulan	33	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang diteliti dan diverifikasi	Dok	23967	Dok	7989		7989	7989 Dok	33	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 -2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2021) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023		
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	12
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang tertagih	Wajib pajak 780000					Wajib pajak 260000	260000	33	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah	Laporan 12					4 Laporan	4	33	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan retribusi daerah	Laporan 12					4 Laporan	4	33	

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Secara umum dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing Bidang. Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel T.C 30

TC. 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase tercapainya penerimaan pajak & retribusi daerah			-	85%	-	-	-	126.41%	-	-	-	
2	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD			-	-	27.93%	24.67%	24.69%	-	-	24.67%	24.69%	
3	Persentase kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD			-	-	4.26%	3.59%	3.36%	-	-	3.59%	3.36%	

II. 3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 5 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan daerah, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Badan pendapatan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif dan akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah selaku pengelola pendapatan daerah berbagai permasalahan dihadapi berikut daftar permasalahan yang dihadapi di seluruh bidang SKPD Bapenda:

1. Tidak tercapainya target penerimaan PAD
2. Penagihan dan pengawasan belum dilakukan secara insentif
3. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan operasional dalam peningkatan pendapatan
4. Belum optimalnya penerimaan pajak dan retribusi yang didukung oleh sarana IT (belum terintegrasi dan belum online)
5. Kurang Sumber Daya Manusia

Disamping permasalahan di atas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah juga menghadapi tantangan dan peluang diantaranya :

1. Tantangan

1. Mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak
2. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

2. Peluang

- a. Adanya Sistem Pengelolaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah berbasis IT
- b. Tingkat pendidikan aparatur pengelola yang tinggi
- c. Kuantitas aparatur pengelola pendapatan daerah

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program /kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel T.C31

TC.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	13,010,845,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	13,774,048,100	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 persen	16,195,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 persen	61,370,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA, DPPA)	2 dokumen	10,650,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA, DPPA)	2 dokumen	37,237,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja)	2 Laporan	3,360,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja)	2 Laporan	21,964,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan money)	4 laporan	2,185,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan money)	4 laporan	2,169,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Target capaian	Indikator Kinerja	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100 persen	10,481,710,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100	10,736,925,100	100	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu		Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100	10,736,925,100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	10,468,110,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	10,650,007,900	12	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	10,650,007,900	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Waktu pelaksanaan administrasi tugas ASN	12 bulan	8,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Waktu pelaksanaan administrasi tugas ASN	12	83,058,500	12	Waktu pelaksanaan administrasi tugas ASN		Waktu pelaksanaan administrasi tugas ASN	12	83,058,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,510,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1,448,000	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1,448,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1,730,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	1,557,600	4	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	1,557,600	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	2,360,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	853,100	1	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	853,100	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi penerimaan retribusi pasar	91 persen	351,772,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi penerimaan retribusi pasar	91	367,952,700	100	Persentase realisasi penerimaan retribusi pasar		Persentase realisasi penerimaan retribusi pasar	100	367,952,700	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Objek Retribusi Daerah Yang Terdata dan Terdaftar	3937	178,170,000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Objek Retribusi Daerah Yang Terdata dan Terdaftar	3937	294,131,650	3937	Jumlah Objek Retribusi Daerah Yang Terdata dan Terdaftar		Jumlah Objek Retribusi Daerah Yang Terdata dan Terdaftar	3937	294,131,650	
	Pengolahan Data Retribusi Daerah		Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	12 Bulan	36,454,000	Pengolahan Data Retribusi Daerah		Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	12	23,409,560	12	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah		Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	12	23,409,560	
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		Jumlah SKRD Yang Dicetak	3937	130,703,000	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		Jumlah SKRD Yang Dicetak	3937	50,411,490	3937	Jumlah SKRD Yang Dicetak		Jumlah SKRD Yang Dicetak	3937	50,411,490	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	6,445,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 persen	361,316,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 persen	467,401,700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	300 buah	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	220 buah	11,343,600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	370 Buah	10,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	440 Buah	12,979,500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	13130 Blok	139,500,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	13900 Blok	146,512,600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Tersedia	48 eksemplar	2,928,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Tersedia	252 eksemplar	1,260,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Kali	198,888,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	295,306,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	179,766,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	262,464,400	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	-		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	-							
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel Yang Diadakan	30	20,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel Yang Diadakan	30	20,000,000				Unit	20,000,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	30,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	100,000,000				Unit	100,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19	129,766,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15	142,464,400				Unit	142,464,400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1,430,300,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1,465,150,200				persen	1,465,150,200	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah dokumen yang bermaterai	400	4,444,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah dokumen yang bermaterai	250	3,990,600				lemba r	3,990,600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	356,856,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	188,340,000				Bulan	188,340,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	1,069,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	1,272,819,600				Bulan	1,272,819,600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	189,786,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	412,784,000				persen	412,784,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan STNK Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan STNK Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26 Unit	169,536,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan STNK Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26 Unit	142,886,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	170,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 unit	20,250,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 unit	99,898,000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola Bapenda	100 persen	4,943,455,500	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola Bapenda	100 persen	5,905,585,900	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100 persen	4,943,455,500	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100 persen	5,905,585,900	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah objek pajak baru yang terdata	200 objek pajak baru	36,013,000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah objek pajak baru yang terdata	200 objek pajak baru	41,512,000	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah perda / perbub yang tersusun	5 dok	166,400,000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah perda / perbub yang tersusun	5 dok	158,488,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Target capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah petugas & wajib pajak yang mendapat penyuluhan	100 orang	43,721,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah petugas & wajib pajak yang mendapat penyuluhan	100 orang	96,568,000			
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah aplikasi yang tersedia	1 Aplikasi	128,500,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah aplikasi yang tersedia	1 Aplikasi	149,997,000			
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah objek pajak daerah yang terdaftar	7529 objek pajak	3,100,000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah objek pajak daerah yang terdaftar dan terdaftar	7529 objek pajak	21,496,700			
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah aplikasi basis data pajak daerah yang dipelihara	3 aplikasi	140,350,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah aplikasi basis data pajak daerah yang dipelihara	2 paket	109,330,500			
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah objek pajak PBB dan BPHTB yang termutakhirkan datanya	34000 objek pajak	4,059,445,500	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah objek pajak PBB dan BPHTB yang termutakhirkan datanya	34000 objek pajak	4,556,021,400			
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	260708 wajib pajak	300,000	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	260708 wajib pajak	-			
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Waktu penyediaan layanan dan konsultasi pajak	12 bulan	45,097,000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Waktu penyediaan layanan dan konsultasi pajak	12 bulan	75,497,000			
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang diteliti dan diverifikasi	7989 dok	10,350,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang diteliti dan diverifikasi	7989 dok	12,004,500			
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah wajib pajak yang tertagih	260000 wajib pajak	125,000,000	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah wajib pajak yang tertagih	260000 wajib pajak	222,328,900			
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah	4 laporan	108,000,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah	4 laporan	362,336,700			

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah laporan hasil pemeriksaan retribusi daerah	4 laporan	77.179,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah laporan hasil pemeriksaan retribusi daerah	4 laporan	100,005,200	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai tugas dan fungsi serta peran kemendagri sebagai poros pemerintahan dan politik dalam negeri, penegakan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa, dengan melaksanakan pelayanan public serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kebijakan dan strategi Kemendagri dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk mendukung perwujudan 5 (lima) program prioritas pembangunan nasional tahun 2019-2024. Adapun kelima program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan infrastruktur
3. Penyederhanaan regulasi
4. Reformasi birokrasi
5. Transformasi ekonomi.

III. 2 TUJUAN RENJA BAPENDA

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menuangkan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk mempertajam fokus pelaksanaan visi organisasi yaitu dengan merumuskan tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perencanaan strategis 2019-2023 adalah meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak & retribusi daerah

III. 3 SASARAN RENJA BAPENDA

Sasaran merupakan target spesifik dari suatu tujuan yang ingin dicapai, dihasilkan dan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian

integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas..

Sasaran Badan Pendapatan Daerah berdasarkan rumusan yang masih sesuai dengan rumusan sasaran yang ada di dalam renstra adalah sebagai berikut :

- a. Penyempurnaan landasan hukum pungutan
- b. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / retribusi akan pentingnya penerimaan pajak / retribusi untuk pembangunan
- c. Terlaksananya pengawasan, koordinasi dan pengendalian di bidang pendapatan daerah
- d. Tercapainya target penerimaan pendapatan asli daerah

III. 4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka kerja sama dengan masyarakat.

Adapun Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Renja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan kabupaten/kota, terdiri dari 8 kegiatan, yaitu:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan, terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
 - a. Pengelolaan pendapatan Daerah



Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat pada tabel T.C 33.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023**

Kode	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDUKATIF	SUMBER DANA	NG	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDUKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota		100	13,774,048,100			100	13,762,155,526	
..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Pangkajene Sidrap	100	persen	61,370,000 APBD		8.00	61,984,000	
..01.2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA, DPPA)	Pangkajene Sidrap	2	dokumen	37,237,000 APBD		2	37,609,000	
..01.2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja)	Pangkajene Sidrap	2	Laporan	21,964,000 APBD		2	22,184,000	
..01.2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan money)	Pangkajene Sidrap	4	laporan	2,169,000 APBD		4	2,191,000	
..01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu		100	persen	10,736,925,100 APBD		4	10,844,294,000	
..01.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN		12	bulan	10,650,007,900 APBD		12	10,756,508,000	
..01.2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu pelaksanaan administrasi tugas ASN		12	bulan	83,058,500 APBD		12	83,889,000	
..01.2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Laporan	1,448,000 APBD		1	1,462,000	

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDUKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDUKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	
										4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
..01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	1,557,600	APBD	2	Laporan	1,573,000		
..01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	853,100	APBD	1	Laporan	862,000		
..01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi penerimaan retribusi pasar	100	persen	367,952,700	APBD	92	92%	371,633,000		
..01.2.04.04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah Yang Terdapat dan Terdaftar	3937	objek retribusi	294,131,650	APBD	4133	4133 Objek Retribusi	297,073,000		
..01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	12	Bulan	23,409,560	APBD	12	12 Bulan	23,644,000		
..01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah SKRD Yang Dicetak	3937	Lembar	50,411,490	APBD	4133	4133 Lembar	50,916,000		
..01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Retribusi Daerah	2	Laporan	-	APBD	2	2 Laporan	-		
..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100	persen	467,401,700	APBD	100%	100%	472,076,000		
..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	220	buah	11,343,600	APBD	300	300 buah	11,457,000		
..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	440	Buah	12,979,500	APBD	380	380 Buah	13,109,000		
..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	13900	Blok	146,512,600	APBD	13261	13261 Blok	147,978,000		

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEREMINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDUKATIF	SUMBER R DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDUKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
..01.2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tersedia	252 eksemplar	1,260,000 APBD	APBD	48 eksemplar	1,273,000				
..01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	295,306,000 APBD	APBD	100 Kali	298,259,000				
..01.2.07 0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	262,464,400 APBD	APBD	100%	265,089,000				
..01.2.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	-	- APBD	APBD						
..01.2.07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Didadakan	30 Unit	20,000,000 APBD	APBD	30 Unit	20,200,000				
..01.2.07.0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	100,000,000 APBD	APBD	1 Unit	101,000,000				
..01.2.07.1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	142,464,400 APBD	APBD	19 Unit	143,889,000				
..01.2.08 0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1,465,150,200 APBD	APBD	12 bulan	1,479,801,000				
..01.2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterial	250 lembar	3,990,600 APBD	APBD	400 lembar	4,030,000				
..01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	188,340,000 APBD	APBD	12 Bulan	190,223,000				
..01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	1,272,819,600 APBD	APBD	12 Bulan	1,285,548,000				

Kode	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDUKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDUKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	
										4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
..01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		100	412,784,000	APBD		100%	416,912,000		
..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan STNK Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		26 Unit	142,886,000	APBD		26 Unit	144,315,000		
..01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2 Unit	170,000,000	APBD		2 Unit	171,700,000		
..01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		50 unit	99,898,000	APBD		50 unit	100,897,000		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola Bapenda		100	5,905,585,900	APBD		100%	5,964,643,000		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah		100	5,905,585,900	APBD		100%	5,964,643,000		
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah objek pajak baru yang terdata		200	41,512,000	APBD		200 objek pajak baru	41,927,000		
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah perda / perbub yang tersusun		5	158,488,000	APBD		5 dok	160,073,000		
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah petugas & wajib pajak yang mendapat penyuluhan		100	96,568,000	APBD		100 orang	97,534,000		

Kode	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATAT AN PENTI NG	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDUKATIF	SUMBE R DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDUKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.02.04.2.0 1.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang tersedia	1	Aplikasi	149,997,000	APBD		1	Aplikasi	151,497,000
5.02.04.2.0 1.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak daerah yang terdata dan terdaftar	7529	objek pajak	21,496,700	APBD		7529	objek pajak	21,712,000
5.02.04.2.0 1.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi basis data pajak daerah yang dipelihara	2	paket	109,330,500	APBD		3	aplikasi	110,424,000
5.02.04.2.0 1.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak PBB dan BPHTB yang termutakhirkan datanya	34000	objek pajak	4,556,021,400	APBD		34000	objek pajak	4,601,582,000
5.02.04.2.0 1.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	260708	wajib pajak	-	APBD		260708	wajib pajak	-
5.02.04.2.0 1.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Waktu penyediaan layanan dan konsultasi pajak	12	bulan	75,497,000	APBD		12	bulan	76,252,000
5.02.04.2.0 1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang diteliti dan diverifikasi	7989	dok	12,004,500	APBD		7989	dok	12,125,000
5.02.04.2.0 1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang tertagih	260000	wajib pajak	222,328,900	APBD		260000	wajib pajak	224,552,000
5.02.04.2.0 1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah	4	laporan	362,336,700	APBD		4	laporan	365,960,000
5.02.04.2.0 1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan retribusi daerah	4	laporan	100,005,200	APBD		4	laporan	101,005,000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 terdapat 2 program, 9 kegiatan dan 40 sub kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi misi kepala daerah. Maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian sub kegiatan maka pada setiap sub kegiatan dirumuskan indikator kinerja sub kegiatan.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 yang tertuang dalam Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dapat dilihat pada table TC.34

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDUKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota		100	13,774,048,100		
..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100	61,370,000	APBD	
..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA, DPPA)		2	37,237,000	APBD	
..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja)		2	21,964,000	APBD	
..01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan money)		4	2,169,000	APBD	
..01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu		100	10,736,925,100	APBD	
..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN		12	10,650,007,900	APBD	
..01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu pelaksanaan administrasi tugas ASN		12	83,058,500	APBD	
..01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1,448,000	APBD	
..01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4	1,557,600	APBD	
..01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	853,100	APBD	
..01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi penerimaan retribusi pasar		100	367,952,700	APBD	
..01.2.04.04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah Yang Terdaftar dan Terdaftar		3937	294,131,650	APBD	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDUKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3					8
..01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah		12	23,409,560	APBD	
..01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah SKRD Yang Dicitak		3937	50,411,490	APBD	
..01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Retribusi Daerah		2	-	APBD	
..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor		100	467,401,700	APBD	
..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia		220	11,343,600	APBD	
..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia		440	12,979,500	APBD	
..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia		13900	146,512,600	APBD	
..01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tersedia		252	1,260,000	APBD	
..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60	295,306,000	APBD	
..01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	262,464,400	APBD	
..01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		-	-	APBD	
..01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan		30	20,000,000	APBD	
..01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	100,000,000	APBD	
..01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		15	142,464,400	APBD	
..01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1,465,150,200	APBD	
..01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai		250	3,990,600	APBD	
..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	188,340,000	APBD	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDUKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
..01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor		12	1,272,819,600	APBD	
..01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		100	412,784,000	APBD	
..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan STNK Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		26	142,886,000	APBD	
..01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2	170,000,000	APBD	
..01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		50	99,898,000	APBD	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola Bapenda		100	5,905,585,900	APBD	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah		100	5,905,585,900	APBD	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah objek pajak baru yang terdata		200	41,512,000	APBD	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah perda / perub yang tersusun		5	158,488,000	APBD	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah petugas & wajib pajak yang mendapat penyuluhan		100	96,568,000	APBD	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang tersedia		1	149,997,000	APBD	
5.02.04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak daerah yang terdata dan terdaftar		7529	21,496,700	APBD	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi basis data pajak daerah yang dipelihara		2	109,330,500	APBD	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDUKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3					8
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBSP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak PBB dan BPHTB yang termutakhirkan datanya	34000	objek pajak	4,556,021,400	APBD	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	260708	wajib pajak	-	APBD	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Waktu penyediaan layanan dan konsultasi pajak	12	bulan	75,497,000	APBD	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang diteliti dan diverifikasi	7989	dok	12,004,500	APBD	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang tertagih	260000	wajib pajak	222,328,900	APBD	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah	4	laporan	362,336,700	APBD	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan retribusi daerah	4	laporan	100,005,200	APBD	



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang akan menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan merumuskan kebijakan pendapatan daerah, merumuskan sistem informasi pajak dan retribusi daerah, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan & evaluasi pemunutan pajak dan retribusi daerah, melaksanakan pemutahiran data objek pajak. Di samping itu perlu penyusunan perencanaan awal / Renja yang lebih komprehensif, efektif.

Semoga Penyusunan Renja ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita-cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat. Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.